

**PENGARUH KUALITAS PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE, SHARIA COMPLIANCE
DAN KOMPLEKSTAS BANK TERHADAP *FRAUD*
(Studi pada Bank Umum Syariah Priode 2014-2018)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh :

**NAMA : DELLA AYU SAFITRI
NPM : 1651030011
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH**

Acc bab 1-5
28/8/20
14



24/9
Acc Rektua da
Pengisi II

Acc. Skripsi Bab 1-5
Bandar Lampung, 7 Agust
2020

Any Eliza

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**PENGARUH KUALITAS PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE, SHARIA COMPLIANCE
DAN KOMPETENSI BANK TERHADAP *FRAUD*
(Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh :

**NAMA : DELLA AYU SAFITRI
NPM : 1651030011
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH**

Pembimbing I : Any Eiza, M.Ak

Pembimbing II : Yetri Martika Sari, M. Acc., Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Fraud merupakan suatu masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, dan biasanya dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki pengalaman dibidangnya yang terjadi karena adanya kesempatan serta adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu adanya unsur prinsip syariah tidak menjamin bank umum bank umum syariah terbebas dari tindakan *fraud*. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fraud*, sedangkan untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah *good corporate governance*, *sharia compliance* dan kompleksitas bank. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kualitas *good corporate governance*, *sharia compliance*, dan kompleksitas bank secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap *fraud* di bank umum syariah syariah di Indonesia periode 2014-2018. Dan bagaimanakah perspektif islam tentang pengaruh GCG, *sharia compliance* dan kompleksitas bank terhadap *fraud*. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance*, *sharia compliance*, dan kompleksitas bank secara parsial dan simultan terhadap *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018. Dan untuk menganalisis bagaimanakah perspektif islam tentang pengaruh GCG, *sharia compliance* dan kompleksitas bank terhadap *fraud*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 14 bank yang terdaftar di bank Indonesia tahun 2014-2018. Metode penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel yang digunakan 6 bank dengan jumlah penelitian 5 tahun maka jumlah keseluruhan sampel 30 data. Dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari tata kelola perusahaan yang baik yang ditunjukkan oleh nilai *self assessment*, kepatuhan syariah yang ditunjukkan oleh kualifikasi pendidikan anggota DPS, dan kompleksitas bank yang ditunjukkan oleh total jaringan bank. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* maka dari itu H_0 diterima H_1 ditolak, *sharia compliance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* maka dari itu H_0 diterima H_1 ditolak, dan kompleksitas bank berpengaruh terhadap *fraud* maka dari itu H_0 ditolak H_1 diterima. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa *good corporate governance*, *sharia compliance* dan kompleksitas bank berpengaruh secara bersama-sama terhadap *fraud*. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,293 yang berarti bahwa konservatisme mampu dijelaskan sebesar 29,3% oleh variabel *good corporate governance*, *sharia compliance*, dan kompleksitas bank. Sisanya sebesar 70,7% dipengaruhi variabel lain.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, *Sharia Compliance*, Kompleksitas Bank, *Fraud*.



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Della Ayu Safitri
NPM	: 1651030011
Prodi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governace, Sharia Compliance dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud (Studi Pada Bank Umum Syariah Priode 2014-2018)”**

adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 12 Agustus 2020
Penyusun,



Della Ayu Safitri
1651030011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Leikol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

PENGARUH KUALITAS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *SHARIA COMPLIANCE* DAN KOMPLEKSITAS BANK TERHADAP *FRAUD* (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PRIODE 2014-20018)

Nama Mahasiswa : **DELLA AYU SAFITRI**

NPM : **1651030011**

Program Studi : **Akuntansi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Any Eliza, S.E., M.Ak


Yetri Martika Sari, M.Acc.Ak

NIP.198308152006042004

NIP.198403282018012001

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah


Any Eliza, S.E., M.Ak

NIP.198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGARUH KUALITAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, SHARIA COMPLIANCE, DAN KOMPLEKSITAS BANK TERHADAP FRAUD (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PRIODE 2014-20018)** disusun oleh **Della Ayu Safitri, NPM : 1651030011** Jurusan Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin/ 21 September 2020.**

TIM MUNAQSAH

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Isaeni, M.Ag

Sekretaris : Okta Suprianingsih, S.E., M.E.Sy

Penguji 1 : Ahmad Zuliansyah, S.Si., MM

Penguji 2 : Any Eliza, S.E., M.Ak



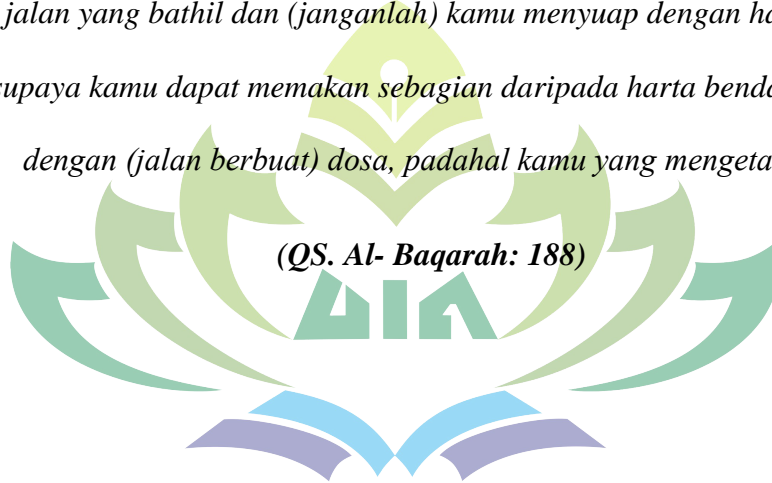
Dr. Rustan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu yang mengetahui.”

(QS. Al- Baqarah: 188)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, memberikan kemudahan kepada penulis, dari hati yang terdalam skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat aku cintai, Bapak Darmansyah dan Ibu Rosmala Sari. Yang telah mengasih dan menyayangiku dengan penuh ketulusan, yang selalu sennatiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, terimakasih atas kepercayaannya dan cinta kasih yang kau wujudkan dalam pengorbananmu selama ini. Semoga karya ini dapat menjadi sebab tangisan harumu atas pencapaian anakmu.
2. Kepada adikku Deni Aprizal, Romizad, Dora Yurlita, dan Denti Alissya yang selalu memberikan inspirasi agar menjadi seorang yang baik hal ini menjadi penyemangat bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan ini. Serta seluruh kerabat keluarga besar berkat dukungan Dan Doa-nya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik semoga Allah selalu senantiasa melindungi.
3. Sahabat seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan bermanfaat dan ikatan ukuwah akan selalu di tanamkan dalam diri kita

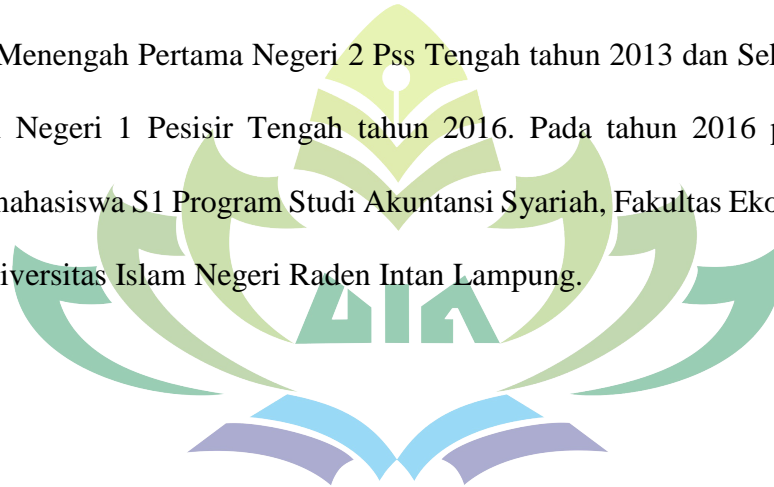
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menuntut ilmu semoga semakin yakin jaya, berkualitas dan semakin di depankan nilai-nilai kebaikan



RIWAYAT HIDUP

Della Ayu Safitri, yang akrab di panggil Della ini dilahirkan di Desa Walur, Kecamatan Krui Selatan pada tanggal 27 Desember 1997, merupakan anak pertama dari lima bersaudara merupakan putri dari pasangan Bapak Darmansyah dengan Ibu Rosmala Sari.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Walur tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pss Tengah tahun 2013 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pesisir Tengah tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah rabbal ‘alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas *Good Corporate Governance, Sharia Compliance* Dan Kompleksitas Bank Terhadap *Fraud* (Studi Pada Bank Umum Syariah Priode 2014-20018)” dengan tepat waktu, dan sholawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang mana menjadi suri tauladan bagi umat Islam didunia.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan A. Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam proses penelitian skripsi.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak, selaku ketua program studi Akuntansi Syariah, sekaligus pembimbing satu yang telah banyak meluangkan waktunya dan

dengan sangat sabar memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan banyak motivasi sehingga skripsi ini selesai.

4. Ibu Yetri Martika Sari, M.Acc.,Ak, selaku pembimbing dua yang telah membantu meluangkan waktu dan memberi banyak arahan dalam membimbing serta memberikan banyak motivasi sehingga skripsi ini selesai tepat waktu.
5. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak motivasi positif serta ilmu yang bermanfaat pada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
6. Kedua orang tuaku, adik- adik dan keluarga besar yang telah memberi dukungan, motivasi, semangat, nasihat dan doa yang tiada henti.
6. Sahabat- sahabat seperjuangan khususnya Jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2016 semoga kita bisa dan dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat.
7. Teman- teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 69 dan perangkat Desa Sumber Sari serta UKM-F Risef terimakasih atas semangat dan pembelajaran yang telah diberikan selama ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam *ukhwah islamiyah*.

Banyak kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, namun penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, pada Allah penulis mohon ampun. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis,



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	16
E. Rumusan Masalah	16
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.....	20
----------------------	----

1. <i>Agency Theory</i>	20
2. Bank Syariah	21
3. <i>Good Corporate Governance</i>	24
4. <i>Sharia compliance</i>	33
5. Kompleksitas Bank.....	37
6. <i>Fraud</i>	38
B. Tinjauan Pustaka	48
C. Kerangka Pikir.....	51
D. Hipotesis.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	58
1. Pendekatan Penelitian.....	58
2. Jenis Penelitian	58
B. Teknik Pengumpulan Data.....	59
C. Sumber Data.....	60
D. Populasi dan Sampel	60
1. Populasi	60
2. Sampel	60
E. Definisi Operasional Penelitian.....	62
F. Uji Asumsi Klasik	64
1. Uji Normalitas	64
2. Uji Multikolenieritas	65
3. Uji Autokorelasi	66
4. Uji Heteroskedasitas.....	67
G. Metode Analisis Regresi Linear Berganda.....	68
H. Uji Hipotesis.....	69
1. Uji T	69
2. Uji F.....	70
3. Uji Determinasi (R^2).....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	71
1. Analisis Statistik Deskriptif	71
2. Uji Asumsi Klasik	73
a) Uji Normalitas	73
b) Uji Multikolonieritas	75
c) Uji Heteroskedasitas	76
d) Uji Autokorelasi	77
3. Analisis Regresi Linear Berganda	78
4. Penguji Hipotesis	79
a) Penguji Hipotesis 1	80
b) Penguji Hipotesis 2	80
c) Penguji Hipotesis 3	80
5. Uji T	81
6. Uji F	82
7. Uji Determinasi (R^2)	83
B. Pembahasan	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Faktor dan Bobot Penilaian GCG Pada Bank Umum Syariah.....	27
Tabel 2.2 Klasifikasi Pringkat Komposit Kualitas Pelaksanaan GCG	28
Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian.....	61
Tabel 3.2 Sampel penelitian.....	62
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	63
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	72
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolonieritas	75
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	77
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	78
Tabel 4.5 Hasil Uji T.....	81
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	82
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	51
Gambar 4.1 Uji Normalitas	74
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas	76



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2** Turnitin
- Lampiran 3** Daftar Populasi Penelitian
- Lampiran 4** Daftar Sampel Penelitian
- Lampiran 5** Nilai *Good Corporate Governance*
- Lampiran 6** Nilai *Sharia Compliance*
- Lampiran 7** Jumlah Kompleksitas Bank
- Lampiran 8** Jumlah *Fraud* pada Bank Umum Syariah
- Lampiran 9** Data Variabel Penelitian
- Lampiran 10** T Tabel
- Lampiran 11** F Tabel
- Lampiran 12** Tabel DW
- Lampiran 13** Contoh *Self Assesment*
- Lampiran 14** Contoh Kualifikasi Pendidikan DPS
- Lampiran 15** Contoh Jaringan Bank
- Lampiran 16** Contoh *Fraud*
- Lampiran 17** SK Bimbingan Dosen Pembimbing
- Lampiran 18** Berita Acara Proposal

Lampiran 19 SK Munaqosah

Lampiran 20 Berita Acara Munaqosah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, *Sharia Compliance*, dan Kompleksitas Bank terhadap *Fraud* (Studi kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018) maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang di gunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik dari orang ataupun benda yang membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2. Kualitas

Kualitas adalah "tujuan yang sulit dipahami, karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik".²

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah "pergerakan yang dilakukan setelah oragnisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1045.

²Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*,(Jakarta: Gramedia,2002), h.114

struktur organisasi termasuk tersedianya personel sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk”.³

4. *Good corporate governance*

Good corporate governance didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta karyawan) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya (Pegawai atau karyawan, pelanggan, dan staff), berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.⁴

5. *Sharia compliance*

Sharia compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.⁵

6. Kompleksitas

Kompleksitas adalah suatu indikator antar hubungan di dalam suatu proyek, program, atau portofolio yang memengaruhi cara bagaimana

³Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Swakelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visimedia, 2004), h. 7

⁴Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm.1

⁵Chapra, M.U. and Ahmed, H, “Corporate Governance in Islamic Financial Institutions”. Occasional Paper No. 6, (Jeddah: Islamic Research & Training Institute/Islamic Development Bank, 2002), pp. 58-67. 3

hubungan ini akan dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya.⁶

7. Bank Umum Syariah

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷ Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.⁸

8. *Fraud*

Fraud adalah tindakan penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan kepada si penipu. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu: (1) tindakan, (2) menyembunyikan dan (3) konversi. Misalnya pencurian atas harta persediaan adalah tindakan, kemudian pelaku menyembunyikan kecurangan tersebut dengan membuat bukti transaksi pengeluaran fiktif. Selanjutnya setelah perbuatan pencurian

⁶Maya Indriastuti And Luluk M Ifada, "Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.12 No.2 (2011), h168–76.

⁷ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Aji Erlangga Martawireja, 2013), h22

⁸ Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

dan penyembunyian dilakukan, pelaku akan melakukan konversi dengan cara memakai sendiri atau menjual persediaan tersebut.⁹

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi tentang “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, *Sharia Compliance* dan Kompleksitas Bank terhadap *Fraud* (studi pada bank umum syariah di indonesia)” adalah;

1. Secara Objektif

Bank Syariah merupakan lembaga yang dianggap “sakral” dikarenakan menggunakan label syariah dalam perusahaannya. Salah satu hal yang harus diterapkan bank syariah yaitu *sharia compliance* atau kepatuhan pada syariah, dan kemudian mengungkapkannya dalam laporan keuangan dan laporan GCG dari masing-masing bank, dan kompleksitas bank yang di lihat dari jumlah kantor cabang bank tersebut, semakin banyak jaringan bank maka semakin tinggi resiko terjadinya *fraud*, yang bertujuan sebagai jati diri dari bank umum syariah sehingga dapat menciptakan persepsi positif bagi para pembaca laporan bank umum syariah.

⁹Maya Indriastuti And Luluk M Ifada, "Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.12 No.2 (2011), h168–76.

Penerapan *sharia compliance* menjadi hal yang sangat penting dalam dunia perbankan, karena persaingan perbankan sudah semakin ketat serta kesyariaannya sudah jelas menggunakan hukum-hukum islam jadi patut masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah dibanding bank konvensional.

Setiap tahun jaringan bank semakin banyak dan berjalan dengan pesat, bank yang mempunyai jumlah jaringan bank banyak akan semakin kompleks, akan tetapi semakin banyak jaringan bank maka resiko terjadinya *fraud* semakin tinggi. Asumsi masyarakat tentang bank syariah tidak mungkin terjadinya *fraud* karena sudah menjalankannya sesuai prinsip-prinsip syariah tetapi fakta kenyataan dilapangan ternyata bank syariah masih banyak yang terdapat *fraud* di dalamnya salah satunya karena keterbatasan satuan kerja audit internal (SKAI) bank, tidak semua kantor bank dapat di periksa setiap tahun.

2. Secara Subjektif

Penulis sangat optimis dalam menyelesaikan penelitian ini, karena tersedia bahwa data dan literature yang mendukung pembahasan penelitian ini, baik dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

C. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰ Saat ini di Indonesia dikenal dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang di sebut bank syariah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹¹

Bank merupakan lembaga keuangan yang padat regulasi. Setiap aktivitasnya tidak luput dari ketentuan dan pantauan para regulator. Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan yang maksimal atas kepentingan publik. Hal ini merupakan konsekuensi dari karakteristik bank syariah sebagai lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Bank menjalankan

¹⁰Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Bank

¹¹Haifa Najib, "Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2 No.2 (2016), h130–104.

aktivitas intermediasi atas dana yang diperoleh dari masyarakat kemudian dikelola oleh bank, pada akhirnya akan berputar kembali untuk masyarakat sebagai bagian dari roda perekonomian.¹²

Bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam.¹³ Namun, prinsip Islam yang diterapkan belum menjamin bank syariah dapat terbebas dari tindak kecurangan (*fraud*). Pada kenyataannya tindakan curang masih ditemukan pada bank syariah. Bahkan kecurangan tersebut melibatkan pihak internal bank itu sendiri.

Beberapa bank syariah di Indonesia bahkan pernah mengalami *fraud* dengan berbagai modus dan tujuan. Pada tahun 2012, kasus pada Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Atas kasus tersebut Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai BSM.¹⁴

Kasus *fraud* juga terjadi pada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) syariah yang melibatkan (Plt) direktur utama Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) syariah yang memberikan kredit fiktif sebesar Rp 548 miliar kepada

¹²Ade sopyan mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah". *Jurnal Madania*, Vol 20 No.1 (2016), h 1- 53

¹³Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensi". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 29 No.2 (Mei-Agustus 2014), h.194-195

¹⁴Dani Prabowo, "Kredit Fiktif Bsm Terendus Sejak 2012, 3 Pegawai Sudah Dipecat". Diakses Tanggal 2 April 2016, [Http://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2013/10/24/2349078/Kredit.Fiktif.Bsm.Terendus.Sejak.2012.3.PegaWai.Sudah.Dipecat](http://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2013/10/24/2349078/Kredit.Fiktif.Bsm.Terendus.Sejak.2012.3.PegaWai.Sudah.Dipecat)

PT. HSK dengan tidak mentaati prosedur dalam pemberian kredit tersebut, belakangan kredit itu diketahui dilakukan tanpa agunan.

Kasus *fraud* juga pernah menimpa Negara lain seperti yang dialami Dubai Islamic Bank yang harus kehilangan dana sebesar US\$ 300 miliar yang disebabkan karena *financial statements* yang buruk. Selain itu *Islamic Bank of South Africa* juga mengalami kasus *fraud* akibat dari manajemen dan sistem akuntansi yang buruk dan tidak tepat, sehingga bank tersebut mengalami kebangkrutan yang disebabkan hutang yang berkisar R50 hingga R70 juta.¹⁵

Kasus penggelapan tabungan di Bank Muamalat cabang Mataram turut menambah daftar *fraud* pada bank syariah. Kasus tersebut melibatkan salah satu karyawan yang bekerja di bagian pemasaran Bank Muamalat cabang Mataram dengan sengaja tidak mencatat transaksi keuangan milik nasabah kedalam laporan keuangan bank. Dari kasus tersebut mengakibatkan pihak bank mengalami kerugian sebesar Rp 9 miliar. Kasus penggelapan uang juga terjadi pada Bank Bukopin Syariah cabang Medan yang mengakibatkan kerugian sebesar 1,3 miliar. Pelaku tak lain adalah dua mantan pegawai staff *information technology* (IT) dan internal control bagian pendebitan yang memanipulasi transaksi debit tersebut. Dengan munculnya kasus- kasus *fraud* yang terjadi dilembaga keuangan syariah membuktikan bahwa tidak ada jaminan bahwa lembaga keuangan syariah bebas dari tindakan *fraud*.

¹⁵Rini, "The Effect of Audit Committee Role and Sharia Supervisory Board Role on Financial Reporting Quality at Islamic Banks in Indonesia". *Journal of Economics, Business, and Accountancy*. Ventura 17, no. 1 (2014), h. 145–156.

Dari beberapa kasus *fraud* yang terjadi pada bank syariah dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan tersebut dilakukan oleh pihak internal bank itu sendiri. Pada dasarnya semua pihak berharap bank syariah memiliki ketahanan lebih kuat dan terbebas dari risiko *fraud*. Meskipun telah banyak kebijakan dan regulasi yang mengawasi kegiatan bank, akan tetapi faktanya setiap orang berpeluang untuk melakukan kecurangan.¹⁶

Fraud adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak yang tidak baik kepada individu atau entitas lain.¹⁷ *Fraud* yang terjadi dalam organisasi disebabkan oleh lemahnya kontrol yang dilakukan oleh pihak manajemen, selain itu komponen yang biasa disebut dengan *fraud triangle* (insentif/tekanan, kesempatan, dan sikap) juga menjadi pendorong terjadinya *fraud*.¹⁸

Kecurangan atau penipuan dalam pandangan islam merupakan perbuatan yang tercela, karena hal tersebut sudah merugikan orang lain. Jika manusia melakukan perbuatan kecurangan maka orang tersebut sudah tidak menghargai kejujuran dalam mencapai suatu tujuan. Sebagaimana di dalam Al- Qur'an sudah tercantum larangan untuk melakukan tindakan kecurangan. Allah SWT berfirman dalam surat Al- Muthafifin ayat 1-7:

¹⁶Haifa Najib and Rini, "Sharia Compliance , Islamic Corporate". *jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Vol.4 No.2 (2016), h131–46.

¹⁷Listiana Norbarani, "Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Tringle Yang Di Adopsi Dalam SAS No.99".(Skripsi Program S1 Ekonomi Universitas Dipanegoro,Semarang, 2012), h.17

¹⁸Rusman Soleman, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.17 No.1 (Juni 2013), h.57-74

وَيَلِّ لِلْمُطَفِّينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ (7)

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta di cukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan semesta alam, Sekali-kali jangan begitu! sesungguhnya catatan orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. (Q.S Al- Muthafifin ayat 1-7).

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan yang bakal dijual, lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemiliknya menjawab,”Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda,”Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami”.¹⁹

Dalam hadis tersebut teranglah bahwa mengecoh/menipu itu haram, dosa besar. Sepakat para ulama bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama, menurut akal pun terela.

¹⁹ H.R Muslim No.102

Tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah hingga pihak manajemen puncak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud* adalah melalui penerapan prinsip *good corporate governance* pada bank syariah secara optimal. Tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) merupakan seperangkat tata hubungan antara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya.²⁰ *Good corporate governance* juga sebagai proses pemantauan kinerja perusahaan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat terkait dengan konsep-konsep seperti transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Terdapat empat komponen yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu: *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan secara menyeluruh.²¹

Good corporate governance dalam suatu bank berfungsi sebagai pembentuk struktur yang membantu bank dalam berbagai peranan manajemen.²² Penerapan GCG mampu menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan

²⁰Dara finanda, "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan (GCG) terhadap Kinerja Bank". (Skripsi S1 Universitas Andalas, di padang, 2016), h.19-20

²¹Uswatun Hasanah, "Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah". (Skripsi S1 Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015), h.33-34

²²Ali Mashud, "Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.264

bermasalah. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi bank untuk berkembang dengan baik dan sehat.²³

Sebagai lembaga yang berprinsip syariah, kegiatan bank juga harus dikontrol dengan baik agar tidak keluar dari koridornya, disiplin, serta meminimalkan risiko perbankan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah pada industri keuangan syariah, fungsi tersebut merupakan tindakan dan langkah yang bersifat preventif untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Bank Indonesia (PBI) 55/POJK/03/2016 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)).²⁴

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan syariah.²⁵ *Sharia compliance* menjadi pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah serta sebagai pembeda dari bank konvensional. Bank syariah sebagai entitas yang memiliki karakter khusus tidak terlepas dari risiko dalam pengelolaannya. Bank syariah

²³Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance, 2004

²⁴Ali Rama and Yella Novela, "Syariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 4.No.2 (2015), h 111–26

²⁵Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi*, (Surakarta, 2012), h.1-17

memiliki risiko reputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Karena pada umumnya, masyarakat tidak hanya melihat dari aspek operasional tetapi juga spiritual.

Beberapa hal yang menyebabkan risiko reputasi syariah seperti pelayanan terhadap nasabah yang kurang baik, pembagian margin yang sangat tinggi, pegawai yang berbusana tidak sopan, dan yang paling parah yaitu karena terjadi pelanggaran terhadap aspek syariah. Oleh sebab itu dibutuhkan prinsip kehati-hatian bagi para pelakunya. Kepatuhan syariah harus dijalankan oleh bank syariah sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya *fraud*.²⁶

Urgensi kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan kegiatan oleh bank syariah tetap berdasar pada ketentuan syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan dan perbankan syariah, diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah berada di posisi yang strategis untuk memastikan terlaksananya kepatuhan terhadap prinsip syariah pada lembaga keuangan dan perbankan syariah.²⁷

²⁶Sula, Atik Emilia, et. al, "Pengawasan, Strategi Anti Fraud dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah". *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, vol. 2 No 2(2014),h 91-100

²⁷Akhirul Lutfinanda Dan Andrwiani Sinarasri, "Analisis Pengaruh Pengungkapan Syari'ah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah. Maksimum". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.4 No.1 (September 2013- februari 2014), h. 23-28

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada beberapa lembaga keuangan syariah di dunia, penerapan GCG terbukti dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah membuat nasabah berpindah ke bank bank lain sebesar 85%.²⁸ Tantangan utama bank syariah saat ini adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari stakeholders. Sementara itu, *fraud* merupakan tindakan yang melanggar hukum. Ketika suatu bank mengalami *fraud* yang terlalu sering, tentu akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bank tersebut. Pada kenyataannya, tindakan *fraud* sering merugikan pihak bank sendiri. Oleh sebab itu, penerapan GCG dan kepatuhan terhadap prinsip syariah penting dilakukan secara optimal bagi bank syariah untuk memperbaiki reputasi dan kepercayaan serta untuk meminimalisir terjadinya *fraud* pada bank syariah.²⁹

Selain kualitas pelaksanaan *good corporate governance* dan kepatuhan syariah, kompleksitas bank juga menjadi faktor tinggi rendahnya tingkat *fraud* yang terjadi pada suatu bank. Bank yang besar dan kompleks membutuhkan pengawasan dan infrastruktur pengawasan yang baik. Semakin kompleks operasional suatu bank, peluang terjadinya *fraud* semakin besar. Mengingat bahwa perusahaan yang kompleks adalah perusahaan yang memiliki jaringan operasional yang luas (jumlah kantor cabang dan

²⁸Chapra, M.U and Ahmed, H, "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions". Occasional Paper No. 6, (Jeddah: Islamic Research & Training Institute/Islamic Development Bank, 2002), pp. 58-67. 3

²⁹Sula, Atik Emilia,et.al, "Pengawasan Startegi Anti Fraud dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah". Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting, Vol.2 No 2 (2014), h 91-100

jangkauan wilayah yang luas), sistem teknologi yang rumit, serta manajemen yang banyak.³⁰

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haifa Najib dan Rini pada tahun 2016 yang berjudul “*Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud Pada Bank Syariah*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah *Islamic corporate governance* dan *sharia compliance* dengan proksi *Islamic income ratio* dan proksi *Islamic investment ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, sedangkan *sharia compliance* dengan proksi *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank syariah. Sampel diambil dengan teknik Purposive Sampling sebanyak 12 bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.³¹

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Asrori pada tahun 2014 yang berjudul “*Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kerja Bank Syariah*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan *Implementasi Islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *Islam sharia conformity* akan tetapi tidak

³⁰Nidaul Hasanah, “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Ukuran (Size), dan Kompleksitas Bank terhadap Fraud Perbankan Syariah Periode 2011-2013”. (Skripsi S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015), h 7

³¹Haifa Najib dan Rini, “ Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.4, No. 2 (2016), h. 13.

berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang di ukur menggunakan rasio-rasio keuangan konvensional.³²

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, *Shariah Compliance*, dan Kompleksitas Bank terhadap *Fraud* (Studi Pada Bank Umum Syariah Priode 2014-2018)

D. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian serta menghindari kesimpangsiuran dalam membahas dan menganalisis pengaruh variabel *good corporate governance* terhadap *fraud* yang ditunjukan dengan nilai *self assessment*, *sharia compliance* ditunjukan dengan kualitas pendidikan anggota DPS berstatus Doktor, Kompleksitas Bank di tunjukan dengan jumlah jaringan bank, dan untuk *fraud* yang di ditunjukan dengan jumlah *fraud internal* yang terdapat di laporan tahunan bank umum syariah. Priode penelitian ini hanya di batasi 2014-2018.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap tingkat *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia ?

³²Asrori, “Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kerja Bank Syariah“. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.6, No.1 (2014), h. 43.

2. Apakah *Sharia Compliance* berpengaruh terhadap *Fraud* pada bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah kompleksitas bank berpengaruh terhadap tingkat *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah *good corporate governance*, *sharia compliance*, dan kompleksitas bank secara simultan berpengaruh terhadap *fraud* di bank umum syariah di Indonesia?
5. Bagaimanakah perspektif ekonomi Islam tentang pengaruh *good corporate governance*, *sharia compliance* dan kompleksitas bank terhadap *fraud*

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap tingkat *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh *sharia compliance* terhadap tingkat *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas bank terhadap tingkat *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance*, *sharia compliance*, dan kompleksitas bank secara simultan terhadap *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.

5. Untuk menganalisis perspektif ekonomi islam tentang pengaruh *good corporate governance*, *sharia compliance*, dan kompleksitas bank terhadap *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Kontribusi Teoritis

1. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang audit, khususnya mengenai pengaruh *sharia compliance* dan *good corporate governance* terhadap *fraud* pada bank syariah.
2. Penelitian selanjutnya, menjadi referensi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* dan *sharia compliance* pada pelaksanaan GCG BUS di Indonesia terhadap *fraud* pada bank syariah.
3. Penulis, sebagai saran untuk menambah wawasan di bidang audit, terutama mengenai pengaruh *sharia compliance* dan *good corporate governance* pada pelaksanaan GCG BUS di Indonesia terhadap *fraud* pada bank syariah.

b. Kontribusi Praktis

1. Pemilik dan pegawai bank syariah, menjadi referensi dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan di dalam bank syariah

2. Auditor, menjadi referensi dalam upaya untuk memeriksa dan meneliti apakah terjadi dan terdapat unsur kecurangan di dalam bank syariah
3. Nasabah ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bank syariah, menjadi referensi menilai kemungkinan terjadi kecurangan dalam bank syariah
4. Regulator, menjadi bahan pertimbangan dalam membuat regulasi yang terkait dengan kecurangan pada bank syariah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. *Agency Theory* (Teori Keagenaan)

Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara *principle* dan *agent*. Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.³³

Berdasarkan teori ini, terjadi pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) sehingga menimbulkan *agency problem*. Selanjutnya pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana *agent* memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak *principle*. Asimetri informasi muncul ketika agent lebih banyak mengenal (mengetahui) informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang di kenal/diketahui oleh principal dan stakeholder lainnya.³⁴ Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya. Perbedaan

³³Jensen, M. C., & Meckling, W. H., "Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol.3 No.4, (1976), 305-360.

³⁴Rini anugrah, "Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud". *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol.3 No.1 (2014), 101-113

kepentingan menyebabkan agen menyalah gunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada prinsipal dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi agen. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan di antara seluruh stakeholder ini terjamin.³⁵

Kaitan antara teori agensi ini dengan *fraud* pada bank syariah ialah dimana *fraud* atau kecurangan merupakan akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency problem* yaitu asimetri informasi, dimana informasi yang dimiliki oleh agen digunakannya untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi prinsipal maupun perusahaan. Meskipun bank syariah menggunakan prinsip-prinsip Islam, tetapi tidak menjamin bank syariah terbebas dari adanya tindakan *fraud* karena *fraud* bisa saja terjadi dan berasal dari lingkungan internal bank syariah sendiri.

2. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang atau perbankan yang operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa

³⁵*ibid*

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya harus sesuai dengan prinsip syariah Islam.³⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 di sebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam pengoperasiannya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.³⁷

b. Karakteristik Bank Syariah

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain;³⁸

- 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*);
- 3) Konsep uang adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas;
- 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang,
- 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

³⁶Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.2

³⁷Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia

³⁸Ikatan Akuntansi Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), h. 1-2

Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini;³⁹

- 1) Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
- 2) Bukan riba
- 3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
- 4) Tidak ada penipuan
- 5) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, dan
- 6) Tidak mengandung unsur judi.

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam.

c. Dasar Hukum Bank Syariah

Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur

³⁹Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),h.5

kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁴⁰

Pengaturan (*regulasi*) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

3. *Good Corporate Governance*

a. *Definisi Good Corporate Governance*

Menurut pendapat Farrar, secara etimologis kata governance berasal dari bahasa Prancis kuno *gouvernance* yang berarti pengendalian (*control*) dan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*).⁴¹

Menurut Claessens, definisi dari *good corporate governance* terbagi menjadi dua kategori. Definisi pertama terkait dengan seperangkat pola perilaku, yaitu perilaku aktual perusahaan, dalam hal ini termasuk pengukuran kinerja, efisiensi, pertumbuhan, struktur finansial, dan perilaku terhadap pemegang saham serta *stakeholder* lain. Adapun definisi yang kedua yaitu terkait dengan kerangka normatif,

⁴⁰Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia

⁴¹Akhmad Syakhroza, "Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN" (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005), h. 4

yaitu aturan di mana perusahaan beroperasi di bawah aturan tersebut, dengan aturan yang bersumber dari sistem perundang-undangan, sistem hukum, pasar keuangan, dan pasar faktor produksi (tenaga kerja). Definisi kategori pertama digunakan untuk studi yang dilakukan pada satu negara atau perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Adapun definisi kategori kedua bisa digunakan untuk penelitian komparatif yang membandingkan kerangka normatifnya.⁴² *Good corporate governance* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai “penguasaan perusahaan” dan didefinisikan sebagai pokok persoalan mengenai siapa yang berkuasa atau menguasai perusahaan join saham (*joint stock company*).⁴³

Berbagai literatur mendefinisikan istilah *good corporate governance* dengan pengertian yang berbeda-beda dan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut tinjauan Syahroza, keberagaman definisi *good corporate governance* biasanya disesuaikan dengan konteks bahasan, asumsi serta perspektif (*school of thoughts*) yang digunakan. Namun demikian, dilihat dari substansi pokok dari definisi-definisi *good corporate governance* tetap mengandung esensi yang sama dengan esensi yang ada pada ranah kebijakan publik yaitu pengaturan dan

⁴²Stijn Claessens, “Corporate Governance and Development, Global Corporate Governance”. Forum Focus I, (2003), h. 4

⁴³C. Pass, B. Lowes, dan L. Davies, Kamus Lengkap Ekonomi, Terj. Tumpal Rumapea dan Pusman Halobo, Edisi 2, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 117.

hubungan institusional yang mengarah dan mengendalikan suatu perusahaan.⁴⁴

b. *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah

Perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip Shiddiq berarti memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Tabligh berarti secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Amanah berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Sedangkan Fathanah berarti memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).⁴⁵

⁴⁴Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), h. 28.

⁴⁵Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 29 No.2 (Mei-Agustus 2014), h. 194-195

Peraturan Bank Indonesia ini mewajibkan bank syariah untuk menerapkan *Good corporate governance*, melakukan *self assessment* serta membuat laporan pelaksanaan *Good corporate governance* dalam laporan tahunannya. Terkait tata cara pelaksanaan *self assessment* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/SEOJK.03/2014 yang menjelaskan bahwa penilaian atas pelaksanaan *Good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan terhadap 11 faktor yang mana *self assessment* dilakukan dengan menggunakan kertas kerja *self assessment*.

Tabel 2.1
Faktor dan Bobot Penilaian GCG Pada Bank Umum Syariah

No	Faktor	Bobot %
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.59
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan	5.00
6	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
8	Penerapan fungsi audit intern	5.00
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	5.00
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,	15.00

	laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	
TOTAL		100.00

Sumber : Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS

Adapun penilaian peringkat pelaksanaan *good corporate governance* menurut bank Indonesia (2017) dilakukan sebagai berikut :

1. Dari masing- masing faktor tersebut diturunkan kedalam sub faktor/kriteria untuk penilaian faktor untuk menetapkan nilai peringkat pada masing- masing faktor.
2. Melakukan pembobotan untuk masing- masing faktor tersebut dengan menggunakan presentase pembobotan.
3. Nilai akhir dari masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot presentasi dengan hasil peringkat dari masing-masing faktor.
4. Penetapan nilai

Tabel 2.2
Klasifikasi peringkat komposit pelaksanaan *good corporate governance*

No	Nilai komposit	Predikat komposit
1	Nilai komposit <1,5	Sangat baik
2	$1,5 \leq \text{nilai komposit} < 2,5$	Baik
3	$2,5 \leq \text{nilai komposit} < 3,5$	Cukup baik
4	$3,5 \leq \text{nilai komposit} < 4,5$	Kurang baik
5	$4,5 \leq \text{nilai komposit} < 5$	Tidak baik

Sumber : Bank Indonesia

Good corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang

dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga- lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas mendorong disiplin, mengatasi dampak moral *hazard* dan melaksanakan fungsi *check and balance*. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah, antara lain: sistem pengendalian intern, manajemen risiko, ketentuan yang mengarahkan pada peningkatan keterbukaan informasi, sistem akuntansi, mekanisme jaminan kepatuhan syariah, audit ekstern.⁴⁶

Keenam perangkat di atas, pada dasarnya berlaku bagi semua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Adapun yang membedakannya adalah bahwa di bank syariah perlu adanya perangkat yang dapat menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturan syariah. Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank, setidaknya terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu:

- 1) Perlunya pengesektifan aturan dan mekanisme pengakuan (endorsement) dari otoritas fatwa, dalam hal ini DSN-MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah
- 2) Perlunya pengesektifan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal ini, permasalahan yang sering

⁴⁶Nasirwan Ilyas, *Seputar Isu Corporate Governance dalam Bank Syariah*, (Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan www.bi.go.id, 2006)

muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fiqh dan syariah, serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.⁴⁷

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sejarah dan perkembangan *corporate governance*, teori mengenai *corporate governance* ini berkembang karena adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Dalam teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, hubungan keagenan (antara agent dengan principal) menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang terdiri dari biaya pengawasan oleh pemilik, biaya pengikatan agen, dan sisa kerugian yang harus ditanggung pemilik misal akibat kesalahan pengambilan keputusan oleh agen.⁴⁸

Dapat diamati bahwa perkembangan konsep mengenai *good corporate governance* berdasarkan konsep dalam teori keagenan hanya terbatas pada masalah antara pemilik dana dengan pengelola dalam sebuah perusahaan swasta. Munculnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan jawaban atas ketidakpuasan ilmuwan keuangan atas kinerja teori keagenan dalam tataran empiris, karena saat ini bukan hanya pemilik dana dan pemberi pinjaman saja yang harus diperhatikan, melainkan juga seluruh stakeholder.

⁴⁷Khotibul Umam, "Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia" (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.198

⁴⁸Jensen, M. C., & Meckling, W. H., "Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol.3 No.4, (1976), 305-360.

Perspektif *shareholding* atau *shareholder value theory* dapat dianggap sebagai cara memandang perusahaan secara tradisional yang berlandaskan pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan dioperasikan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Oleh karena itu menurut teori ini dalam kajian Smerdon yang dikutip oleh Sutedi, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya maka nilai yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit.

c. Urgensi *Good Corporate Governanace* pada Bank Syariah

Penerapan prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditunjukkan kepada adanya tanggungjawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkn benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah di gariskan dalam hukum positif yang khusus untuk bank syariah harus mematuhi Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:⁴⁹

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan;
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*;
4. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimasi;
5. Mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan agen;
6. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholders* atas kinerja perusahaan di masa depan.

⁴⁹Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 29 No.2 (Mei-Agustus 2014), h.194-195

Dengan demikian melalui beberapa tujuan di atas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah antara lain: sistem pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi bank, sistem akuntansi, pemurnian dan audit syariah, dan audit ekstern.⁵⁰

4. *Sharia Compliance*

a. *Definisi Sharia Compliance*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip shari'ah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.⁵¹

Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan

⁵⁰*Ibid*,h.195

⁵¹Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 – Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, h.1

lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan pemenuhan prinsip syariat Islam (*Sharia Compliance*) bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktifitas keuangannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*Sharia Compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha syariah.⁵² Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah)

Sharia Compliance dalam penelitian ini di ukur dengan cara skoring terhadap 3 katagori yaitu,⁵³

1. Jumlah DPS (Jika jumlah DPS pada bank syariah memenuhi ketentuan peraturan Bank Indonesia, yaitu minimal 2 anggota diberi nilai 1 dan jika tidak sesuai di beri nilai 0.

⁵²Rahman El Janusi, "Implementasi Shari'ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah". *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1, 2012, h. 99.

⁵³Ali Rama dan Yella Novela, "Shariah Government Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah". *Jurnal Akuntansi*, Vol4 No 2, 2015, h.113

2. Kualitas pendidikan anggota DPS, Jika anggota DPS berstatus Doktor maka di beri nilai 1 dan jika sebaliknya di beri nilai 0.
3. Frekuensi rapat DPS, jika kehadiran rata- rata anggota DPS dalam rapat DPS lebih dari 50% maka diberi nilai 1 dan jika sebaliknya diberi nilai 0.

b. Tujuan *Sharia Compliance*

Bank Umum *Sharia* sebagai salah satu lembaga keuangan shari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip *sharia*. Pemenuhan terhadap nilai-nilai *sharia* (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan shari'ah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT.berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin & manusia kecuali untuk menyembah ('ibadah) Ku." (Q.S. Az-Zariyat: 56)⁵⁴

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintah jin dan manusia di perintahkan untuk beribadah bukan karena allah butuh di sembah. Akan tetapi, Allah SWT ingin di puji ketaatan jin dan manusia sebagai makhluk yang telah diciptakannya.⁵⁵

⁵⁴ Q.S az- zariat ayat 56, "Waqaf Qur'an" (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang), Juz ke-27.

⁵⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "Tafsir Ringkas: Al-Qur'an Al-Karim" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016),Jilid 2, h. 679

c. Mekanisme Pengawasan *Sharia Compliance* Bank Umum Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan *sharia* secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep *sharia* review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan *sharia*. Kedua, konsep internal *sharia* review bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip shari'ah yang telah ditentukan.⁵⁶

Sistem pengawasan internal *sharia* ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui *sharia* review, dan internal audit melalui internal syariah review. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip *sharia* maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit *sharia* yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.⁵⁷

⁵⁶Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia), h.146

⁵⁷Ghaneiy Septian Ardhaningsih, "Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCP Surabaya Gubeng" (Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012). h.145

5. Kompleksitas Bank

Dalam penelitian ini, kompleksitas ditentukan dengan jumlah jaringan kantor bank. Bank yang mempunyai jumlah jaringan kantor banyak akan semakin kompleks. Kompleksitas bank membutuhkan pengendalian yang tinggi.

Bank yang dianggap memiliki ukuran dan kompleksitas yang tinggi antara lain apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: (1) bank yang memiliki total aktiva sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); (2) Bank yang aktif secara internasional (*internationally active banks*), yaitu Bank yang memiliki kantor cabang di beberapa Negara lain atau Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat di luar negeri; (3) Bank yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang atau lebih; (4) Bank yang memiliki 150.000 (seratus lima puluh ribu) nasabah atau lebih; dan atau (5) Bank yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam transaksi/ produk/jasa.⁵⁸

Kompleksitas ditentukan dengan jumlah jaringan kantor bank. Bank yang mempunyai jumlah jaringan kantor banyak akan semakin kompleks. Kompleksitas bank membutuhkan pengendalian yang tinggi. Dengan keterbatasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bank, tidak semua kantor bank dapat diperiksa setiap tahun. Hal tersebut menyebabkan kejadian

⁵⁸Maya Indriastuti And Luluk M Ifada, "Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.12 No.2 (2011), h168–76.

fraud terlambat diketahui dan mendorong terjadinya *fraud*. Pemeriksaan intern oleh SKAI tersebut merupakan salah satu pelaksanaan CG.⁵⁹

6. *Fraud*

Dalam bahasa aslinya, *fraud* atau kecurangan meliputi berbagai tindakan melawan hukum.⁶⁰ Sedangkan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (2012) mendefinisikan *fraud* sebagai Setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan kepada si penipu. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu⁶¹

1. Tindakan
2. Penyembunyian
3. konversi

Di Indonesia *fraud* yang terkait dengan perbankan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum, yang menyatakan bahwa *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Theodorus M. Tuanakotta , Akuntansi Forensik dan Audit Investigatis Edisi 2 (Jakarta: Jakarta: Salemba Empat, 2012)

⁶¹Amran dalam Amrizal, "Pengaruh Gejala Fraud Dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Farud Di PT Panaikang Intim Sejatera". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol.11 No.1 (2016), h.52

sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan definisi di atas, pengertian *fraud* adalah suatu tindakan ilegal yang di sengaja, ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan yang dilakukan dengan mengelabui, menipu atau memanipulasi untuk memperoleh keuntungan.

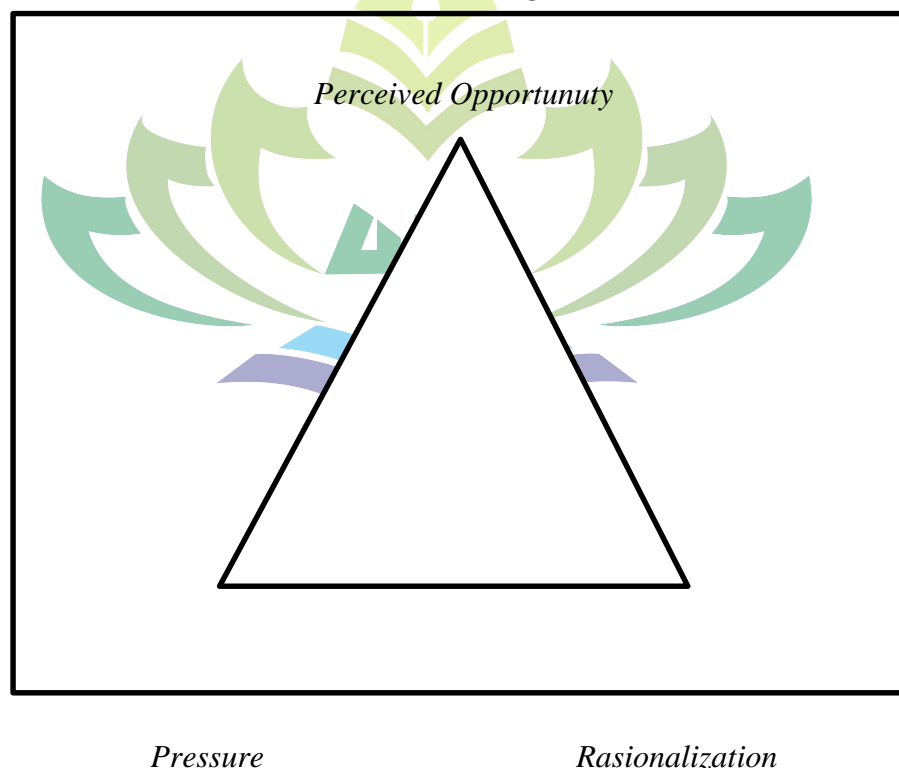
Penelitian ini berfokus pada *fraud* yang terjadi dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) atau biasa disebut internal *fraud* sebab menurut riset *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menunjukkan bahwa jenis *fraud* yang memiliki resiko terbesar bagi perusahaan diseluruh dunia adalah korupsi dan billing scheme yang mana keduanya termasuk kedalam kategori *occupational fraud*, selain itu *occupational fraud* menjadi ancaman terbesar terutama bagi perusahaan yang memiliki pengawasan yang lemah seperti perusahaan kecil.

Tuanakotta menerangkan bahwa *fraud* dilakukan karena wujud tiga kondisi yang disebut *fraud triangle* yakni pertama adanya motif tekanan (*pressure/incentive*), kedua adanya motif kesempatan (*opportunity*), dan ketiga adanya motif rasionalisasi/sikap (*rationalization/attitude*) atau kecenderungan pelaku untuk membenarkan tindakannya. Seseorang atau sekelompok orang akan melakukan *fraud* jika dalam diri mereka ada tekanan atau dorongan yang dapat timbul dari berbagai situasi, misalnya kebutuhan yang mendesak (anggota keluarga yang sakit), mungkin ada

tekanan dari pihak lain seperti tekanan dari atasan untuk melakukan kecurangan, ketidakpuasan terhadap perusahaan tempat kerja, adanya sikap rakus (*greedy*) dan yang lainnya. Motif tersebut kemudian menyebabkan seseorang atau sekelompok orang mencari peluang untuk melakukan *fraud* dan peluang itu menjadi terbuka jika pengendalian internal yang ada di perusahaan lemah.⁶²

Gambar 2.1

Fraud Triangle



Sumber: Tuanakotta

⁶²M Theodorus Tunakotta, "Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi", (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), h. 15.

Lemahnya pengendalian internal juga dapat menjadi penggoda bagi individu atau kelompok orang yang sebelumnya tidak terpikir untuk melakukan *fraud* malah terdorong untuk melakukan *fraud*, karena di depan mereka ada peluang yang terbuka lebar untuk berbuat curang. Kecenderungan seseorang untuk membenarkan apapun tindakannya disebut dengan rasionalisasi. Pelaku *fraud* biasanya yakin bahwa tindakan *fraud* yang dilakukannya bukan kecurangan melainkan sesuatu yang merupakan haknya, dan menurut mereka seharusnya perusahaan dapat mengerti karena mereka telah banyak berbuat jasa untuk perusahaan. Ada kalanya seseorang tergoda melakukan tindakan *fraud* karena tindakan itu juga dilakukan oleh teman-teman didalam perusahaan dan mereka tidak dihukum atas tindakan tersebut.

Munculnya tindakan *fraud* seperti yang telah dijelaskan diatas disebabkan oleh faktor internal pelaku. Faktor internal meliputi motif tekanan dan rasionalisasi dari pelaku *fraud* itu sendiri. Faktor eksternal pelakuk *fraud* merupakan lingkungan perusahaan, misalnya dengan pengendalian internal yang lemah.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyusun peta mengenai fraud di tempat kerja (*occupational fraud*) yang berbentuk pohon dengan cabang dan ranting atau biasa disebut juga dengan peta kecurangan. Peta kecurangan ini menggambarkan bagaimana pembagian *fraud* menurut jenis-jenisnya. Tiga cabang utama dari pohon fraud tersebut terdiri dari:

1. Korupsi (corruption) yang terdiri dari empat ranting yaitu *conflicts of interests* (benturan kepentingan), *bribery* (penyuapan), *illegal gratuities* (pemberian hadiah/ gratifikasi), dan *economic extraction*. Benturan kepentingan bisa terjadi dalam transaksi pembelian maupun penjualan.
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) merupakan pencurian aset karyawan dengan melibatkan orang dalam seperti manajemen, karyawan dan pihak ketiga lainnya misalnya pencurian kas, persediaan dan pengeluaran yang bersifat *fraud*. *Fraud* penyalahgunaan aset akan menyebabkan laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan pedoman prinsip akuntansi yang berlaku umum, bahkan justru melibatkan penyesuaian-penyesuaian yang dibuat untuk menyembunyikan penyalahgunaan aset tersebut. Cabang ini terdiri dari dua ranting yaitu *Cash, Inventory* dan *All Others Assets*.
3. Laporan yang dimanipulasi (*Fraudulent Statement*) yang meliputi *fraudulent financial statements* (fraud laporan keuangan) dan *non-fraudulent financial statements*. *Fraud* dalam laporan keuangan merupakan bentuk dalam salah saji atau kelalaian yang disengaja atas jumlah atau pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut seperti menyajikan aset, pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*Asset/revenue overstatement*). *Fraud* bentuk ini meliputi penyalahgunaan prinsip-prinsip akuntansi yang disengaja, perubahan catatan dan pemalsuan catatan.

Penyalahgunaan asset (*Asset misappropriation*) dan Laporan yang dimanipulasi (*Fraudulent Statement*) merupakan bentuk *fraud* yang banyak terjadi di perusahaan dan organisasi. *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang dapat diandalkan untuk mengurangi dan mencegah dua jenis tindakan *fraud* tersebut.

Red flags adalah kondisi yang tidak biasa, janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Red flags merupakan indikator (symptoms) yang menunjukkan sesuatu yang tidak biasa telah terjadi dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Namun *red flags* tersebut tidak semestinya menunjukkan seseorang bersalah atau tidak, tetapi merupakan tanda-tanda yang memperingatkan mungkin *fraud* telah terjadi. untuk mendeteksi *fraud* pemeriksa harus mempelajari tanda-tanda *red flags* dan menindak lanjutinya sampai semua bukti terkumpul. Pemeriksa harus menemukan apakah tanda-tanda tersebut merupakan hasil dari suatu tindakan *fraud* atau hal lain. Keberadaan tanda-tanda *fraud* tersebut harusnya dapat disadari dan selanjutnya menjadi indikator yang dapat ditindak lanjuti untuk menemukan dan membuktikan adanya *fraud*.

Pada dasarnya terdapat dua tipe kecuranan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan /entitas, seperti kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah

dan lainnya. Sedangkan kecurangan internal adalah tindakan ilegal dari karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap perusahaan tempat ia bekerja.⁶³

Tanda-tanda terjadinya *fraud* dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu:

1. *Accounting anomalies* misalnya penggunaan dokumen fotokopian, pembatalan pembayaran atau kredit yang berlebihan, akun jatuh tempo yang berlebihan, meningkatnya item rekonsiliasi
2. *Internal control weaknesses* meliputi kelemahan pada lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, aktivitas pengendalian dan prosedur. Misalnya tidak ada pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, kurangnya pengamanan fisik aset, kurangnya pemeriksaan yang independen, kurangnya otorisasi, kurangnya pencatatan dokumen yang memadai serta sistem akuntansi yang tidak memadai
3. *Analytical anomalies* adalah prosedur, hubungan, dan kejadian yang tidak biasa dan tidak masuk akal. Meliputi transaksi dan kejadian yang terjadi pada waktu dan tempat yang tidak biasa yang melibatkan orang-orang yang biasanya terlibat dalam transaksi tersebut. Misalnya prosedur, kebijakan, dan praktek yang tidak biasa, kekurangan/kelebihan kas, perubahan volume atau harga yang tidak masuk akal.
4. *Extravagant lifestyle* adalah gaya hidup mewah. Perubahan gaya hidup seseorang pegawai atau pimpinan yang sebelumnya biasa saja kemudian

⁶³Besari, "Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Ukuran (Size) Dan Kompleksitas Bank Terhadap *Fraud* (Kasus Pada Bank Umum Tahun 2007)", "(Tesis S2 Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2009), h.52

menjadi bergaya hidup mewah dengan mobil mewah, pergi keluar negeri dan sebagainya merupakan indikator yang perlu ditindak lanjuti kemungkinan terjadinya *fraud*.

5. *Unusual behavior* adalah perilaku yang tidak biasa. Penelitian psikologi menunjukan bahwa ketikanseseorang melakukan *fraud* terutama untuk yang pertama kali pelaku akan diliputi rasa bersalah, ketakutan dan akan menjadi setres. Seterusnya si pelaku ini akan berkelakuan berbeda dari biasa untuk menutupi perasaan atau rasa stress tersebut.

6. *Tips and complaints* meliputi informasi dan pengaduan tentang kemungkinan terjadinya *fraud*.⁶⁴

Pada lembaga keuangan untuk mengendalikan *fraud* digunakan suatu sistem yang disebut Strategi Anti *Fraud* merupakan wujud komitmen sebuah entitas keuangan dalam mengendalikan tindakan kecurangan. Kebijakan dan prosedur strategi anti *fraud* diterbitkan pada tanggal 01 Juni 2012 sedangkan dasar hukum penerapan Strategi Anti *Fraud* adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 2/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.

Strategi anti *fraud* terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP yang menyebutkan bahwa bank wajib memiliki dan

⁶⁴Albrech, et. al., "Fraud Examination", (Canada: Thomson South-Western, 2006), h. 23.

menerapkan strategi anti *fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis dan resiko *fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi ini berlaku bagi bank umum, dimana yang dimaksud bank umum dalam surat edaran Bank Indonesia ini merupakan bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa system pengendalian *fraud* memiliki empat pilar sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP yaitu:

a. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi resiko terjadinya *fraud* yang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.

b. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistle blowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.

c. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka

menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.

d. Pemantaun, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar pemantaun, evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian dari sitem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme lebih lanjut.

Kecenderungan *fraud* yang umumnya ditemukan pada praktik lembaga keuangan syariah adalah penggunaan metode *accrual basis* dalam hal pengakuan dan penyusunan laporan keuangan. Penerapan prinsip *accrual basis* dalam pencatatan akuntansi menyebabkan peluang terjadinya *abused* pada laporan keuangan. Penyalahgunaan ini biasanya mengarah pada upaya *earnings management* sebuah entitas. Manajemen laba apapun alasannya dapat mengarah pada penyajian laporan keuangan yang tidak benar (*miss leading*) dan akhirnya akan mempengaruhi alokasi sumber-sumber yang ada.

Selain itu, kecenderungan *fraud* pada bank syariah dapat timbul dari *agency problem*. Menurut Maharani dalam penelitiannya yang berfokus pada permasalahan *agency problem* pada kontak *mudharabah* yang mana dalam pembiayaan ini kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak yang bermuamalah mutlak diperlukan agar hubungan keagenan yang tercipta tidak menimbulkan tindakan *fraud*. Beberapa *agency problem* yang ditemui dalam *mudharabah* antara lain adanya konflik kepentingan

saat *mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan *shahibul maal*.⁶⁵

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang berarti peninjauan kembali penelitian-penelitian lebih dulu ada yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Tinjauan pustaka sendiri berfungsi untuk memperkuat karya ilmiah seseorang. Adapun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam.

Jurnal Besari tahun 2009 yang berjudul “pengaruh kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, ukuran (*size*) dan kompleksitas bank terhadap *fraud*”. hasil penelitian tersebut variabel kualitas pelaksanaan GCG dan kompleksitas bank terbukti berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada level of significance kurang 5%.⁶⁶

Jurnal Haifa Najib dan Rini pada tahun 2016 yang berjudul “*Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud Pada Bank Syariah*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah *Islamic corporate governance* dan *sharia compliance* dengan proksi *Islamic income ratio* dan proksi *Islamic investment*

⁶⁵Shinta Maharani, “Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan pada Entitas Publik di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.7, No. 2, 2013, h.7

⁶⁶Besari, “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Ukuran (Size) Dan Kompleksitas Bank Terhadap *Fraud* (Kasus Pada Bank Umum Tahun 2007)”, “(Tesis S2 Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana, Universitas Diponogoro, 2009), h.52

ratio tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, sedangkan *sharia compliance* dengan proksi *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank syariah. Sampel diambil dengan teknik Purposive Sampling sebanyak 12 bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.⁶⁷

Jurnal Asrori pada tahun 2014 yang berjudul “*Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kerja Bank Syariah*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan *Implementasi Islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan *Islam sharia conformity* akan tetapi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan konvensional.⁶⁸

Jurnal Maya Indria Astute dan Luluk M. Ifada yang berjudul “*Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *fraud* yang diukur menggunakan ordinal hasil *self assessment* dan kompleksitas usaha bank berpengaruh positif terhadap *fraud* yang diukur menggunakan rasio-rasio jumlah bank.⁶⁹

⁶⁷Haifa Najib dan Rini, “*Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah*”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.4, No. 2 (2016), h. 13.

⁶⁸Asrori, “*Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kerja Bank Syariah*”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.6, No.1 (2014), h. 43.

⁶⁹Maya Indriastuti And Luluk M Ifada, “*Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.12 No.2 (2011), h168–76.

Jurnal Abdi Saputra pada tahun 2017 yang berjudul “ Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud* (Kecurangan) ”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem internal control berpengaruh negative dan signifikan terhadap *fraud*, Audit internal berpengaruh negative dan signifikan terhadap *fraud* dan penerapan *good corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan. Sampel diambil dengan teknik Purposive Sampling sebanyak 3 bank syariah anak perusahaan BUMN di Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.⁷⁰

Jurnal Rifki Muhammad, Ratna Kusumadewi dan Samsuber Saleh pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Tindakan *Fraud* ”. Hasil dari penelitian tersebut adalah *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Investment Ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *fraud*. Sedangkan variable independen *Islamic Income Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Islamic Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *fraud*. Sample diambil dengan teknik sampling dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel.⁷¹

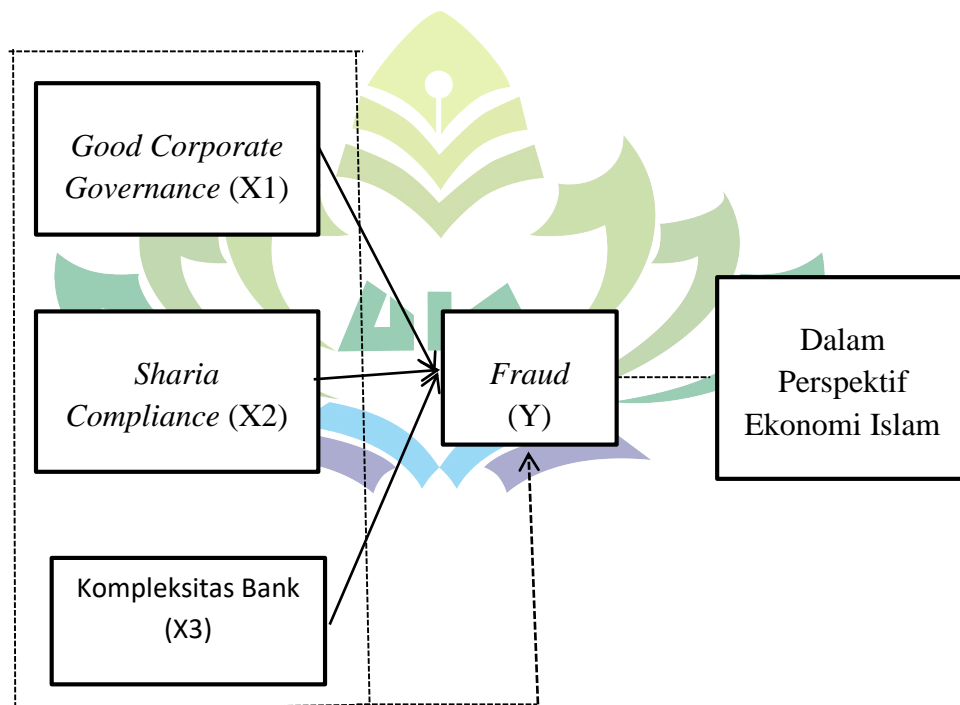
⁷⁰Abdi Saputra, “ Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Fraud (Kecurangan) ”. *Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No.1 (2017), h.52

⁷¹Rifki Muhammad, Ratna Kusumadewi dan Samsuber Saleh, “Analisis Pengaruh Syari’ah Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud ”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2019), h. 76.

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni mengenai pembahasan yang diteliti, persamaan tersebut membahas *fraud* (kecurangan) tetapi terdapat perbedaan mengenai variabel penelitian, tempat penelitian, periode penelitian.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dapat di gambarkan



Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan :

—————

: Hubungan secara Parsial
: Hubungan secara Simultan

Dalam kerangka pemikir penelitian di atas, terjadi hubungan antara kualitas pelaksanaan *good corporate governance* dengan *fraud*, serta *sharia compliance* dengan *fraud* dan kompleksitas bank terhadap *fraud*.

D. Hipotesis

1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Pelaksanaan ketentuan *Good Corporate Governance* sangat penting bagi perusahaan termasuk didalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya *public accountability* berkaitan dengan oprasional bank syariah yang diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip yang telah dituliskan dalam hukum positif. Disamping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam Al- Quran , hadis dan ijma para ulama.⁷²

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang tata kelola perusahaan pada bank syariah, seperti yang dilakukan oleh Anugerah yang meneliti peranan *Good Corporate Governance* dalam pencegahan *fraud*, yang menunjukkan hasil bahwa penerapan mekanisme internal dan eksternal tata kelola perusahaan dengan memperhatikan dan menjalankan semua prinsip dan fungsi dapat mengurangi terjadinya *fraud*. Kemudian

⁷²Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensi". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 29 No.2 (Mei-Agustus 2014), h.194-195

penelitian yang dilakukan oleh Asrori yang meneliti *Islamic Corporate Governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah, yang menunjukkan hasil *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Baik tidaknya penerapan tata kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di mana dalam Surat Edaran BI tersebut penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan di lihat dari nilai komposit hasil *self assessment*, yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai komposit hasil *self assessment* bank syariah diharapkan *fraud* yang terjadi semakin rendah atau berkurang.

H1 : Kualitas pelaksanaan *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *fraud*

2. Pengaruh *Sharia Compliance* terhadap *Fraud*

Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah *Sharia Compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian Chapra dan Ahmad, dimana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola yang dilakukannya berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika terjadi *fraud* dalam operasional bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah.⁷³

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ade Sofyan Mulazid mengenai pelaksanaan *Sharia Compliance* pada bank syariah menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri. Fungsi *Sharia Compliance* oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri.

⁷³M. Umer Chapra and Ahmed Habib, "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions", *Occasional Paper No. 6, (Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank: Jeddah, 2002)*, h. 12-13.

Sedangkan audit internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya tindakan *fraud*.

Pada penelitian ini menguji pengaruh *Sharia Compliance* menggunakan kualifikasi pendidikan anggota DPS. Jika anggota DPS berstatus doktor maka diberi nilai 1. Dan sebaliknya jika tidak sesuai di beri nilai 0.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai *Sharia Compliance* dan pengaruhnya terhadap *fraud* sebagai telah dijelaskan diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : *Sharia compliance* berpengaruh negatif terhadap *Fraud* pada Bank Syariah Mandiri

3. Pengaruh Kompleksitas bank terhadap *fraud*

Dalam penelitian ini, kompleksitas ditentukan dengan jumlah jaringan kantor bank. Bank yang mempunyai jumlah jaringan kantor banyak akan semakin komplek. Kompleksitas bank membutuhkan pengendalian yang tinggi.

Bank yang dianggap memiliki ukuran dan kompleksitas yang tinggi antara lain apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: (1) bank yang memiliki total aktiva sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); (2) Bank yang aktif secara internasional (*internationally active banks*), yaitu Bank yang memiliki kantor cabang di beberapa Negara lain atau Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat

di luar negeri; (3) Bank yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang atau lebih; (4) Bank yang memiliki 150.000 (seratus lima puluh ribu) nasabah atau lebih; dan atau (5) Bank yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam transaksi/ produk/jasa.⁷⁴

Kompleksitas ditentukan dengan jumlah jaringan kantor bank. Bank yang mempunyai jumlah jaringan kantor banyak akan semakin kompleks. Kompleksitas bank membutuhkan pengendalian yang tinggi. Dengan keterbatasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bank, tidak semua kantor bank dapat diperiksa setiap tahun. Hal tersebut menyebabkan kejadian *fraud* terlambat diketahui dan mendorong terjadinya *fraud*. Pemeriksaan intern oleh SKAI tersebut merupakan salah satu pelaksanaan CG. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Kompleksitas bank berpengaruh positif terhadap *fraud* pada bank umum

4. Pengaruh kualitas *good corporate governance*, *sharia compliance* dan kompleksitas bank terhadap *fraud*

Bank umum syariah merupakan bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷⁵ kualitas pelaksanaan *good corporate governance* dan kepatuhan syariah, kompleksitas bank juga menjadi faktor tinggi rendahnya tingkat *fraud* yang terjadi pada suatu

⁷⁴Maya Indriastuti And Luluk M Ifada, "Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.12 No.2 (2011), h168–76.

⁷⁵Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Aji Erlangga Martawireja, 2013),

bank. Bank yang besar dan kompleks membutuhkan pengawasan dan infrastruktur yang baik. Semakin kompleks operasional suatu bank, peluang terjadinya *fraud* semakin besar. Mengingat bahwa perusahaan yang kompleks adalah perusahaan yang memiliki jaringan operasional yang luas (jumlah kantor cabang dan jangkauan wilayah yang luas), sistem teknologi yang rumit, serta manajemen yang banyak.⁷⁶

H4 : Kualitas *good corporate governance*, *sharia compliance* dan kompleksitas bank terhadap *fraud* berpengaruh positif secara simultan terhadap bank umum syariah.



⁷⁶Nidaul Hasanah, "Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Ukuran (Size), dan Kompleksitas Bank terhadap Fraud Perbankan Syariah Periode 2011-2013". (Skripsi S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015), h 7

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, Rita, Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, Vol.3 No 1,h101-113,2014.
- Amrizal, Ak, MM, CFE, *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor Tahun 2012*
- Ardhaningsih, Ghaneiy Septian, *Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCP Surabaya Gubeng Tahun 2012,h.145*
- Asrori, Pengungkapan Syari'ah *Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah, Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, 2011
- Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Pelaksanaan Good Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti fraud Bagi Bank Umum Syariah.
- Besari, Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Ukuran (Size) Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud (Kasus Pada Bank Umum Tahun 2007). Tesis S2 Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana, Universitas Diponogoro, 2009.
- Chapra, M.Umer dan Habib Ahmed, *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions, Jeddah: Islamic Research dan Islamic Institute, Islamic Development Bank*, 2002.
- Departement Pendidikan Nasional (2011) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Drobne,S, dan A. Lisec, Multi-attribute Decision Analysis in GIS: Weighted Linear Combination and Ordered Weighted Averaging (Informatica, 2009),h.459-474
- Finanda, Dara, Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan (GCG) terhadap Kinerja Bank. Skripsi. Padang: Universitas Andalas,2016.
- Hasanah, Nidaul. (2015). Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Ukuran (Size), dan Kompleksitas Bank terhadap Fraud Perbankan Syariah Periode 2011-2013. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hasanah, Uswatun. (2015). Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Ghozali, Imam.”Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS”, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2013.
- Indriastuti, Maya, And Luluk M Ifada, *Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud*, Jurnal *Ekonomi dan Bisnis* Vol.12 No.2,h168–76, 2011.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360, 1976.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016. Tafsir Ringkas: Al-Qur’an Al-Karim. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. Jilid 1
- Lutfinanda, Akhirul & Andrwiani Sinarasri. (2014). Analisis Pengaruh Pengungkapan Syari’ah Compliance terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah pada Prinsip Syariah. Maksimum. Vol. 4. No. 1.
- Maradita, Aldira. 2012. Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika*. 12 (2)
- Muhammad, Rifki, Kusumadewi, Ratna Dan Saleh, Samsuber, Analisis Pengaruh Syari’ah Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud, Jurnal *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 ,2019.
- Mulazid, Sofyan Ade. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah. *MADANI*. Vol. 20. No. 1.
- Najib, Haifa, ‘Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada’, 2 (2016), 130–104
- Najib, Haifa, and Rini, ‘Sharia Compliance , Islamic Corporate’, *Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4 (2016), 131–46
- Norbarani, Lestiana & Rahardjo. (2012). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Triangle yang Diadopsi dalam SAS No.99. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/03POJK/2016 Tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Prabowo, Dani.”Kredit Fiktif BSM Terendus Sejak 2012, 3 Pegawai Sudah Dipecat”. Diakses tanggal 2 April 2016, <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/24/2349078/Kredit.Fiktif.BSM.Terendus.sejak.2012.3.Pegawai.Sudah.Dipecat>
- Q.S Al-Imran ayat 104. Waqaf Qur’an. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang

Q.S An-Nisa ayat 59. Waqaf Qur'an. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang

Rama, Ali, and Yella Novela, 'Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah', *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4.2 (2015), 111–26 <<https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2301>>

Ramli, Samsul Dan Fahrurrazi, *Swakelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, Jakarta : Visi Media, 2004.

Saputra, Abdi, Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Fraud (Kecurangan), *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No.1, 2017.

Saramawati, Dedhi Ana Mey dan Ahmad Tarmizi Lubis, Analisis Pengungkapan Syariah Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011, Vol.2 No.2 (2014), h.116

Sihotan, Dony M, Metode Scoring dan Metode Fuzzy, Vo.5 No.4 (November 2016), h.303

Simamora, Bilson, *Paduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2002.

Soleman, Rusman, Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *JAAI*. Vol. 17. No. 1, 2013.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukardi, Budi. "Corporate Governance Engineering of Islamic Banking and Finance: Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi dan Pasar Bebas", *Jurnal TSAQFAH*, Volume 9 Nomor 1, April, 2013.

Sula, A. E., & Alim, M. N. (2014). Pengawasan, strategi anti fraud, dan audit kepatuhan syariah sebagai upaya fraud preventive pada lembaga keuangan syariah. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 91-100.

Syakhroza, Akhmad . 2005. Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI Ulum.

Sutedi, Adrian, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tuanakotta, Theodorus M. "Akuntansi Forensik dan Audit Investigatis Edisi 2". Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Undang- undang No 10 Tahun 1998 Tentang bank

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, AsaMandiri, 2008

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja & Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

